



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kurun waktu yang cepat dampak dari penggunaan teknologi cukup pesat di semua negara tidak terkecuali Indonesia, hampir semua pemerintah negara berkembang memiliki proyek sistem informasi berkelanjutan yang bertujuan untuk efisiensi dan peningkatan layanan (Avgerou et al., 2016). Dampak ini sudah menyebar ke berbagai sektor pekerjaan di mana menginginkan proses kerja yang efektif dan efisien. Pertumbuhan *Information, Technology and Communication* (ICT) di Indonesia tidak dapat dihindari dan sudah menjadi kebutuhan, hal ini nampak di berbagai instansi di pemerintah dan swasta dalam penggunaan teknologi untuk mempercepat proses, memberikan informasi, dan memasarkan produk.

Memasuki era digital, pada industri 4.0 perusahaan semakin berinvestasi dalam alat dan solusi yang memungkinkan proses, mesin, karyawan, dan bahkan produk mereka sendiri, untuk diintegrasikan ke dalam satu jaringan terintegrasi dalam pengumpulan data, analisis data, evaluasi pengembangan perusahaan, dan peningkatan kinerja (Nagy et al., 2018). Di era ini, memaksa sejumlah perusahaan untuk mengubah strategi, tujuan dan visinya menyesuaikan kemajuan teknologi, dampak yang cukup dirasakan saat segala sesuatu sudah di genggam tangan dari proses pembayaran hingga berbagi informasi melalui sosial media dengan dukungan IoT (*Internet of Things*) dan AI (*Artificial Intelligence*). Hal ini dapat

mengubah tatanan konvensional beralih ke digital sehingga menjadikan pekerjaan dapat dilakukan lebih efektif, mudah untuk membuat keputusan, dan efisien karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Perubahan ini sudah masuk ke dalam semua sektor kehidupan, termasuk di dalamnya dunia pendidikan.

Di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, data pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bersekolah sebanyak 70,71% dan 28,67% tidak sekolah dengan rentang usia 7 – 24 tahun (BPS, 2018). Data ini menyebutkan semakin tinggi kelompok umur sekolah, partisipasi penduduk untuk bersekolah semakin kecil seperti terlihat pada tabel I.1 dibawah ini.

Tabel I-1 Prosentase Penduduk Bersekolah Berdasarkan Umur

Kelompok Umur	Masih Sekolah
7 -12	99,22
13-15	95,36
16 - 18	71,99
19 - 24	24,4

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Dari data diatas merupakan tantangan bagi pemerintah untuk berusaha meningkatkan peserta didik terutama di jenjang yang lebih tinggi (BPS, 2018) sehingga kebutuhan sumber daya untuk mengaplikasikan teknologi dapat tercapai, dengan kata lain mutu pendidikan sudah menjadi prioritas yang menuntut negara harus berinvestasi di bidang ini dan melibatkan Kementrian terkait untuk mempercepat hal tersebut.

Berdasarkan data tahunan Badan Pusat Statistik tahun 2019, Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2019 mencapai 59 juta, naik 5,5 juta dari tahun 2018 sebesar 56 juta (BPS, 2019). Dengan peningkatan pendapatan domestik ini

menunjukkan bahwa kemampuan untuk membeli produk non konsumsi diharapkan naik sehingga prosentase penduduk untuk menyekolahkan anaknya di jenjang yang semakin tinggi ikut meningkat pula. Kesadaran bahwa pendidikan adalah bagian dari kebutuhan masyarakat sudah menjadikan prioritas dengan mengurangi jumlah konsumsi dan dengan ini beban negara akan berkurang karena muncul kemandirian untuk memberikan pendidikan terbaik kepada keluarganya.

1.2 Karakteristik Industri

Perguruan Tinggi (PT) merupakan sebuah ekosistem yang terdiri dari *stakeholders* internal yaitu mahasiswa, staf akademik, dan staf administrasi, serta *stakeholders eksternal* yaitu alumni, industri pendidikan, penyandang dana, mitra bisnis, komunitas lokal, pemerintah, media, dan lain sebagainya. *Stakeholders* internal memiliki peran penting dalam pengambil keputusan dan strategi jangka panjang. *Stakeholder* eksternal merupakan mitra yang berkontribusi secara tidak langsung dalam peningkatan mutu sebuah PT. Untuk itu, setiap PT harus mampu mengidentifikasi *stakeholder* yang dimilikinya agar mampu untuk berkolaborasi dalam meningkatkan tata kelola manajerial, menciptakan nilai bersama, dan mendorong nilai tersebut guna kemajuan bersama.

Menurut (Chapleo & Simms, 2010), manajemen *stakeholders* akan berjalan efektif apabila mampu meningkatkan kualitas dalam pengelolaan, menciptakan nilai, dan meningkatkan kemampuan untuk kemajuan bersama. Dalam hal ini, setiap PT berusaha untuk memberikan nilai lebih dan menyiapkan lulusannya agar mampu berkontribusi terhadap pembangunan dengan memberikan kemampuan kewirausahaan bagi mahasiswanya. Hal ini dimaksudkan agar ke depan *link and*

match dengan industri dan saat terjun ke masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan. Mahasiswa sejak dini didorong agar mampu melakukan inovasi dari bangku kuliah dan nantinya dapat diimplementasikan. Dalam mewujudkan *stakeholders* yang baik, PT harus mampu mengkolaborasikan semua *stakeholders*, salah satunya dengan memilih mitra bisnis yang tepat. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan nilai pada PT namun mampu memberikan nilai bagi *stakeholders* lainnya. Bekerjasama dengan media, agar dapat menyebarkan *content* berupa informasi *benefit value* yang dimiliki sehingga dapat dikenal oleh khalayak luas. Kerjasama dengan komunitas lokal dalam hal memberikan *feedback* sehingga komunitas lokal lebih mandiri dan mampu menghasilkan sesuatu bagi komunitas di sekitarnya. Harapannya, kontribusi yang dilakukan ini mampu menarik penyandang dana untuk memberikan hibah penelitian sehingga akan dihasilkan ilmu-ilmu baru yang lebih inovatif dan *applicable*.

Menurut Portuguez Castro et al. (2019), kewirausahaan diakui sebagai mesin penggerak dalam perekonomian, melalui PT mahasiswa diberi kesempatan yang luas untuk menciptakan hal baru dan mendorong kreatifitas, dengan menggunakan teknologi akan menghasilkan bisnis baru yang mampu memberikan nilai di lingkungan sekitarnya. Berjalannya waktu, pengembangan perusahaan tidak terlepas dari kontribusi dari ilmu pengetahuan dan teknologi, kolaborasi keduanya akan menghasilkan proses kerja yang efektif dan efisien. Proses ini diawali dengan menyusun perencanaan jangka panjang yang diwujudkan dalam visi yang jelas, menentukan infrastruktur yang dibutuhkan dan mengarahkan inovasi guna mendukung pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Hasil akhir yang

diharapkan dalam kolaborasi ekosistem ini mampu menghubungkan dunia industri dan institusi akademik dalam menghasilkan produk-produk yang kreatif, mendorong inovasi guna menciptakan lapangan kerja sehingga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan mampu menumbuhkan perekonomian negara. Dengan membekali mahasiswa kemampuan kewirausahaan dan mendorong untuk pengaplikasiannya, menunjukkan bahwa pendidikan melalui PT mampu menciptakan manusia yang unggul.

Peraturan Permendikbud No 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana sudah dikeluarkan, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan mahasiswa tahun 2020 akan menjadi persaingan di seluruh PT di Indonesia untuk mendapatkan calon mahasiswa, dengan menawarkan *value* yang dimiliki sehingga calon mahasiswa tertarik dan bergabung dengan PT yang diminatinya. Dengan mengambil data dari Ristekdikti menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa saat ini mencapai 6.631.379 dengan jumlah PT mencapai 3.276, terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebanyak 122 dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 3.154. (Ristekdikti, 2020). Untuk itu, setiap PT dituntut untuk menunjukkan kemampuannya dalam memberikan *advantage* yang dimiliki dan dapat bertahan untuk mendapatkan mahasiswa sebanyak-banyaknya, terlebih PTS yang sangat menggantungkan diri terhadap jumlah mahasiswa yang masuk. Namun dengan memiliki PT dalam jumlah besar tidak menjamin kualitas yang dimiliki sesuai kebutuhan pasar sehingga hal ini pun menjadi tantangan bagi perusahaan untuk *link and match* dengan Industri dan keinginan pemerintah untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul.

1.3 Konteks Transformasi Digital Secara Umum

Perguruan tinggi menyadari bahwa untuk menciptakan manusia yang unggul tidak cukup hanya berbekal kewirausahaan, kemampuan *soft skill*, dan *hard skill*, namun kebutuhan penggunaan teknologi menjadi hal yang tidak dapat dilupakan untuk meningkatkan inovasi yang berkelanjutan. Pemerintah juga memiliki peran yang cukup penting sebagai inisiator mewujudkan manusia unggul. Hal ini sesuai program Nawacita yang digagas Presiden Joko Widodo, yaitu menciptakan manusia unggul melalui pendidikan yang dianggap sebagai bagian penting dalam menyiapkan sumber daya yang unggul. Program tersebut juga nampak pada kebijakan dari Kementerian terkait, antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Informasi dan Teknologi (Kominfo) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik tahun 2019, dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 265,015 juta jiwa yang termasuk angkatan kerja sebanyak 131 juta dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) – PT.

Status pekerjaan merupakan jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan yang terbagi menjadi 7 kategori yaitu: berusaha sendiri, buruh tidak tetap, buruh tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja

bebas di pertanian, pekerja bebas non pertanian, majikan. Tabel I.2. Karakteristik Angkatan kerja menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan di Indonesia, menunjukkan bahwa status pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 80,25% berasal dari tingkat pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) – PT yang didominasi oleh lulusan PT; 23,67% dari jenjang SD merupakan buruh tidak tetap/tidak dibayar. Apabila dilihat dari lapangan usaha utama, sebanyak 29,88% lulusan PT bekerja di sektor jasa pendidikan, 25,5% dari lulusan SMA bekerja di sektor perdagangan, 26,8% dari lulusan SMP dan 48,04% lulusan SD bekerja di sektor pertanian/kehutanan dan perikanan.

Dari tabel 1.2 tersebut menggambarkan bahwa sektor pekerjaan formal masih memiliki daya tarik yang cukup besar untuk angkatan kerja dengan tingkat pendidikan akhir Sekolah Menengah Atas (SMA) – PT, yaitu peminatan bekerja dengan instansi swasta dan negara lebih banyak disumbang oleh pekerja dengan dengan jenjang pendidikan SMA dan PT, sedangkan pekerjaan non formal dengan jumlah penghasilan tidak tetap masih didominasi oleh pekerja dengan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan akhir SD –SMP menunjukkan bahwa sektor lapangan kerja formal didominasi oleh lulusan SMA-PT, sedangkan untuk sektor non formal masih didominasi lulusan SD – SMP. Hal ini menunjukkan sektor non formal tidak diminati oleh lulusan SMA dan PT yang memiliki skill dan pendidikan yang lebih tinggi dan sektor non formal didominasi oleh lulusan SD- SMP, dengan kata lain jiwa kewirausahaan tidak diminati oleh angkatan kerja dengan tingkat pendidikan akhir SMA dan PT.

Tabel I-2 Karakteristik Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan Akhir

Jenjang Pendidikan	Lapangan Usaha Utama		Status Pekerjaan Utama	
	%	Jenis Industri	%	Jenis Pekerja
SD	48,04	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	23,67	Buruh tidak tetap/tidak dibayar
SMP	26,80	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	34,15	Buruh/Pegawai/ Karyawan
SMA	25,50	Pedagang besar/eceran	54,55	Buruh/Pegawai/ Karyawan
PT	29,88	Jasa pendidikan	80,25	Buruh/Pegawai/ Karyawan

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Data BPS juga menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 3 tahun terakhir memiliki *trend* naik dari 70,18 (tahun 2016), 70,81 (tahun 2017), dan 71,39 (tahun 2018). Hal ini merupakan indikator bahwa keseriusan pemerintah dalam menciptakan manusia unggul dengan memberikan penguatan pada sektor pendidikan sebagai langkah strategis dalam peningkatan produktivitas dan daya saing negara. Kontribusi itu berupa arahan dari Kemendikbud agar pendidikan tinggi menuju pendidikan yang memerdekakan, yaitu PT diberikan kebebasan yang lebih otonom, sehingga menjadi perubah paradigma pendidikan agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang lebih inovatif. Kemudahan yang diberikan pemerintah dengan membuka program studi baru sehingga dapat mengikuti arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan industri.

Keterlibatan Kementerian Keuangan dengan memberikan instensif Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yaitu mendukung kelanjutan pendidikan masyarakat miskin ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan mengalokasikan dana pendidikan yang kecenderungannya juga naik dalam tiga tahun terakhir (Kemenkeu, 2019). KIP - Kuliah merupakan program pemerintah yang membantu

siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang PT, berlaku untuk seleksi ke PT, baik PTN maupun PTS.

Tabel I-3 Pengalokasian Anggaran Pendidikan Tahun 2017 - 2020

Tahun	Anggaran (Miliar rupiah)	Prosentase
2020	508,1	6,2
2019	492,4	10,8
2018	431,7	6,3
2017	406,1	9,5

Sumber: Laporan Tahunan Kemenkeu (2020)

Dalam tabel I.3. di atas menunjukkan bahwa alokasi dana pendidikan untuk mewujudkan investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia merupakan sebuah prioritas. Alasan strategis dari Kemenkeu dalam sektor pendidikan berupa peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi melalui standarisasi *link and match*, antara pendidikan dan industri, serta pengalokasian dana pendidikan dalam pengembangan riset.

Sedangkan dukungan Kominfo yaitu memberikan sarana kecepatan dalam mengakses informasi. Program yang diluncurkan berupa Palapa Ring, yaitu pembangunan jaringan nasional *backbone* pita lebar (*broadband*) serat optik melalui infrastruktur *broadband* yang dibangun sebagai *Publik Private Pathnersip* (PPP), dengan jangkauan 514 Kabupaten/ Kota. Berdasarkan laporan tahunan Kominfo tahun 2018, manfaat Palapa Ring adalah untuk mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu sehingga bisa memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, serta memberikan layanan *brodband* bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan

sumber dari Badan Akselerasi Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo, jaringan Palapa Ring terbagi menjadi 3 yaitu Barat, Tengah dan Timur. Sampai tahun 2018 sudah mampu memiliki jaringan sepanjang 2,275 KM untuk area barat, 2,995 KM area tengah atau 100% sudah terpasang, dan 6,878 KM area Timur atau 89% sudah terpasang (Kominfo, 2018).

Berdasarkan laporan tahunan Kominfo tahun 2018, ada tiga masalah besar terkait tenaga kerja di Indonesia yaitu pengangguran di usia muda, kekurangan tenaga kerja trampil, serta ketidakcocokan antara pekerjaan dan ketrampilan kerja. Data menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang tidak memenuhi standar ketrampilan (*underqualified*) sebesar 51,5%, kecocokan antara pekerjaan dan ketrampilan pekerja (*well –matched*) sebesar 40%, sisanya *overqualified* sebesar 8% (Kominfo, 2018). McKinsey memprediksikan Indonesia membutuhkan 3.8 juta tenaga kerja terampil setiap tahunnya. Apabila hal ini tidak terpenuhi maka akan berdampak pada situasi ekonomi domestik dan program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Tantangannya berdampak bagi industri bisnis dan dunia pendidikan, salah satunya adalah daya serap industri terhadap lulusan pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan dunia industri.

1.4 Peluang dan Manfaat Transformasi Digital

Dikutip dari siaran pers Kementerian Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti 2019), demi membangun SDM Indonesia unggul, kreatif, dan inovatif dalam menyongsong era Revolusi Industri 4.0, Kemenristekdikti senantiasa meningkatkan akses dan mutu pendidikan tinggi bagi putra-putri

Indonesia. SDM unggul adalah SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengundang *talent-talent* global untuk berkerjasama dengan pemerintah. Selaras dengan itu, pemerintah membakukan komponen dalam menilai kinerja inovasi di Perguruan Tinggi oleh Kemenristekdikti tahun 2018 yaitu:

- Kualitas SDM, yang mencakup prosentase jumlah dosen berpendidikan S3, prosentase jumlah lektor kepala dan guru besar dan rasio mahasiswa terhadap dosen.
- Kualitas Kelembagaan yang mencakup akreditasi institusi dan program studi, jumlah program studi terakreditasi internasional, jumlah mahasiswa asing, serta jumlah kerjasama perguruan tinggi.
- Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan yang mencakup kinerja kemahasiswaan.
- Kualitas Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang mencakup kinerja penelitian, kinerja pengabdian pada masyarakat dan jumlah artikel ilmiah terindeks Scopus per jumlah dosen.
- Kualitas inovasi yang mencakup kinerja inovasi.

(Kemenristekdikti, 2018)

Untuk mewujudkan SDM yang unggul, kontribusi PT banyak diharapkan, sejauh ini PTN dan PTS berlomba-lomba melakukan inovasi dan terus memperbaiki baik dari kurikulum dan fasilitas pembelajaran agar mahasiswa sewaktu belajar mendapatkan rasa nyaman dan aman. Bagi PTS, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan investasi yang cukup besar, berbeda halnya dengan PTN yang mendapat sumber pendanaan dari pemerintah dan didukung dengan fasilitas negara. PTS yang masih menggantungkan diri dari penerimaan

biaya masuk mahasiswa harus mampu selalu berinovasi dan secara terus menerus untuk mengelola keuangan secara efisien, dan kreatif untuk mendapatkan *other income*. Contohnya dengan berkolaborasi dengan industri untuk mendapatkan dana penelitian, aset pembelajaran, dan bekerjasama dengan melibatkan pihak luar *tenant* untuk memberikan layanan ke mahasiswa sebagai cara untuk mandiri dalam hal pembiayaan. Cara lain yang ditempuh dengan mengefektifkan bisnis prosesnya yaitu dengan menggunakan teknologi yang mampu mengurangi waktu kerja, biaya, dan peningkatan mutu. Teknologi hadir untuk membantu penggunaanya agar informasi yang dihasilkan dapat dengan cepat tersampaikan ke *user* dan mendapatkan *feedback*. Menurut (Redlein & Evolutionaries, 2019), studi memperkirakan bahwa secara umum 47% dari semua pekerjaan akan diotomatisasi karena digitalisasi dan *facility service* yang lebih banyak melakukan tugas rutin, daripada tugas non rutin.

Transformasi digital merupakan cara sederhana mentransformasikan bisnis menjadi digital atau mentransformasikan proses bisnis menjadi selaras dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Adapun transformasi digital ini merupakan sebuah kebutuhan organisasi untuk lebih mengefisienkan dari sisi biaya dan mengefektifkan kinerja dengan memoderenisasi dari sistem, proses serta menyelaraskan budaya dan organisasi dengan teknologi digital baru yang selalu berkembang setiap harinya.

Dari hasil kerja yang diperoleh dirasakan dari segi *non financial* bahwa pekerjaan *Facility Management* akan lebih efektif apabila mampu memanfaatkan digitalisasi guna mempercepat proses kerja dan mengurangi tugas rutin yang

monoton terutama untuk unit *front liner* yang berhadapan langsung dengan *user* menjadi prioritas untuk digitalisasikan. Dan dari tahun ke tahun dengan jumlah user yang semakin bertambah, maka digitalisasi mampu mengoptimalkan kinerja *Facility Management* dengan mensupport layanan yang cepat, efektif dan efisien. Sedangkan manfaat dari financial akan mengurangi jumlah SDM dalam mengoperasikan sistem digitalisasi ini dikarenakan dengan adanya sistem pelaporan dan data dapat ditarik *real time*.

Perubahan yang akan diharapkan setelah transformasi digital terdapat peningkatan penggunaan teknologi digital tidak hanya dari sumber daya manusianya namun menggabungkan teknologi dengan semua *resource* yang dimiliki.

1.5 Ancaman dan Tantangan Transformasi Digital

Dalam proses transformasi terdapat tantangan berupa membuka paradigma baru baik dari kalangan pemangku kebijakan maupun pelaku yang akan menggunakan, namun transformasi tidak hanya dipandang sebagai peluang/tantangan, tetapi juga sebagai ancaman. Kemampuan industri dalam memitigasi resiko yang akan muncul, misalnya resistensi, *lack of talent*, *resource*, *security* jaringan, dan disrupsi yang akan menghilangkan posisi pekerjaan.

Guna mengimplementasikan teknologi di dalam bisnis proses di PTS, perlu mendapat dukungan dari pembiayaan internal. Hal ini juga merupakan masalah yang harus segera diatasi dengan mengidentifikasi bagian-bagian yang perlu segera didigitalisasikan terutama di bagian *frontliner* sebagai garda terdepan dalam penyajian layanan ke mahasiswa. *Facility Management* (FM) salah satu bagian dari

frontliner yang mendapatkan prioritas dalam proses digitalisasi. Adapun cakupan dari divisi *Facility Management* berupa pengelolaan kendaraan, parkir, keamanan, penyediaan ruangan, kebersihan, catering, pengelolaan *event* mahasiswa dan *tenant relation*. Dengan jumlah *body intake* yang terus bertambah dari tahun ke tahun, layanan yang mudah diakses, *user-friendly*, dan penyajian informasi yang cepat dan akurat menjadi kebutuhan saat ini agar bisnis proses ini dapat berjalan efektif dan ujung-ujungnya dapat efisien dalam hal waktu dan biaya.

Tantangan yang dihadapi PT saat ini dengan peluncuran Kampus Merdeka yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2020), yang disebut dengan kampus merdeka, dengan program dibawah ini:

1. Pembukaan Program Studi Baru

Otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam *QS Top 100 World Universities*.

2. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi

Program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Waktu mendatang, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis.

3. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kebebasan bagi PTN, terutama Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) didorong untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

4. Hak Belajar Tiga Semester di luar Program Studi

Pemberian hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks). "Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Sebagai tambahan, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan. (Kemendikbud, 2020)

Bukan hal yang mudah mewujudkan program kampus merdeka ditengah PTS dan PTN saling berkompetisi namun dituntut dengan kualitas yang baik pula, tantangan yang di atas menunjukkan bahwa sertiap PT harus mampu melakukan inovasi internal dalam penyusunan kurikulum dan manajemen dalam pengelolaan mahasiswanya, ini menjadikan semua PT harus mampu beradaptasi dengan tetap menunjukkan kualitasnya dan mampu berkolaborasi dengan mitranya.